

DATAR ISI

KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
BAB I PENDAHULUAN	4
I.1. Latar Belakang	4
I.2. Landasan Hukum	5
I.3. Maksud dan Tujuan	6
I.4. Gambaran Umum	6
I.5. Susunan Organisasi	8
I.6. Sistematika Penulisan	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	10
II.1. Rencana Strategik	10
II.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2015	13
II.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2015	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
III.1. Capaian Kinerja Organisasi	19
III.2. Realisasi Anggaran	20
III.3. Evaluasi dan Analisa Kinerja	24
BAB IV PENUTUP	28
IV.1. Kesimpulan	28
IV.2. Saran	30

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Matrik RENSTRA 2014-2019
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Perjanjian Kinerja 2015
4. Rencana Kerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (RENJA) 2015

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, maka Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur menyusun Laporan Kinerja pada Triwulan I Tahun Anggaran 2015 yang berdasarkan pada Perjanjian Kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis SKPD Tahun 2014-2019.

Penyusunan laporan kinerja ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Keberhasilan pada tahun 2014 akan menjadikan tolok ukur untuk peningkatan kinerja di tahun 2015. Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akhirnya melalui Laporan Kinerja pada Triwulan I Tahun 2015 ini, kita harapkan agar terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Biro Administrasi Kemasyarakatan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Gubernur Jawa Timur secara keseluruhan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Surabaya, April 2015

KEPALA BIRO ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN

Drs. BAWON ADHI Y, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 195803291986031007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pembangunan manusia seutuhnya meliputi berbagai aspek kehidupan manusia yang sifatnya kompleks dan dinamis, saling berkaitan antara aspek dan masalah satu dengan yang lain serta terus berkembang.

Dalam kondisi masyarakat yang sedang berubah, dari masyarakat agraris ke industri, masalah Administrasi Kemasyarakatan yang timbul cenderung meningkat dari tahun ke tahun, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Masalah-masalah tersebut harus ditangani secara komprehensif dan kreatif guna mendukung pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan membangun masyarakat Jawa Timur yang sejahtera, beriman, berbudaya, berpendidikan dan berdaya saing.

Garis kebijaksanaan yang melandasi gerak langkah Biro Administrasi Kemasyarakatan, meliputi kebijakan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan peningkatan kualitas produk pendidikan, pemantapan kesadaran, budaya, supremasi hukum serta HAM, penerapan nilai-nilai agama dalam perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, peningkatan peranan pemuda dan pembinaan olahraga serta penyetaraan gender dan perlindungan anak.

Untuk menjabarkan garis-garis kebijakan tersebut, Biro Administrasi Kemasyarakatan yang secara struktural terdiri atas seorang Kepala Biro, 4 orang Kepala Bagian dan 12 orang Kepala Sub Bagian serta 87 staf, melaksanakan berbagai program dan kegiatan di bidang keagamaan, pendidikan, pemuda, olahraga, peranan perempuan dan perlindungan anak serta kebudayaan dan kepariwisataan dalam tataran koordinatif dan administratif.

Kinerja Biro Administrasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, dapat diukur antara lain dari jumlah penyelenggaraan peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan, jumlah koordinasi/pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, jumlah koordinasi/pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas pemuda dan olahraga, jumlah koordinasi/pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas budaya dan pariwisata, jumlah lembaga/organisasi sosial pendidikan keagamaan, jumlah Guru Madin yang disekolahkan kejenjang Strata I, bertambahnya jumlah Muzzaqi, jumlah sarana peribadatan yang mampu ditingkatkan kualitas sarana prasarannya, Jumlah Da'i/Mubaligh yang memahami tentang KKG dan Perlindungan Anak.

Biro Administrasi Kemasyarakatan juga melaksanakan tugas-tugas tambahan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/931/KPTS/013/2014 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014.

Adapun permasalahan dan kendala yang dihadapi Biro Administrasi Kemasyarakatan, tentu saja tidak sedikit. Seperti masalah ego sektoral yang menghambat koordinasi, tidak seimbang jumlah pemohon dengan dana yang tersedia dan kurang disiplinnya pemohon dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Biro Administrasi Kemasyarakatan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan, administrasi dan sumber daya di Bidang Agama, Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata, Pemuda, Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Biro Administrasi Kemasyarakatan sebagai Instansi Pemerintah dan unsur Penyelenggara Negara diwajibkan menetapkan Target Kinerja dan melakukan Pengukuran Kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja merupakan penyampaian akuntabilitas Instansi Pemerintah yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Biro Administrasi Kemasyarakatan pada Triwulan I Tahun Anggaran 2015 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Biro Administrasi Kemasyarakatan pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Biro Administrasi Kemasyarakatan pada Triwulan I dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, substansi penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Biro Administrasi Kemasyarakatan.

I.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;
2. Undang-Undang No. 28 Th. 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;
3. Instruksi Presiden RI No. 7 Th. 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Keputusan Kepala LAN RI No. 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Kepala LAN RI No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 th 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Th. 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen dalam upaya peningkatan kinerja (*performance improvement*) baik dalam bentuk regulasi, distribusi dan alokasi sumberdaya yang dimiliki Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur sekaligus sarana pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran (rencana kerja). Dari hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Biro Administrasi Kemasyarakatan.

I.4. Gambaran Umum Biro Administrasi Kemasyarakatan

a. Gambaran Umum

Sebagai implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Asisten, Biro dan Sub Bagian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

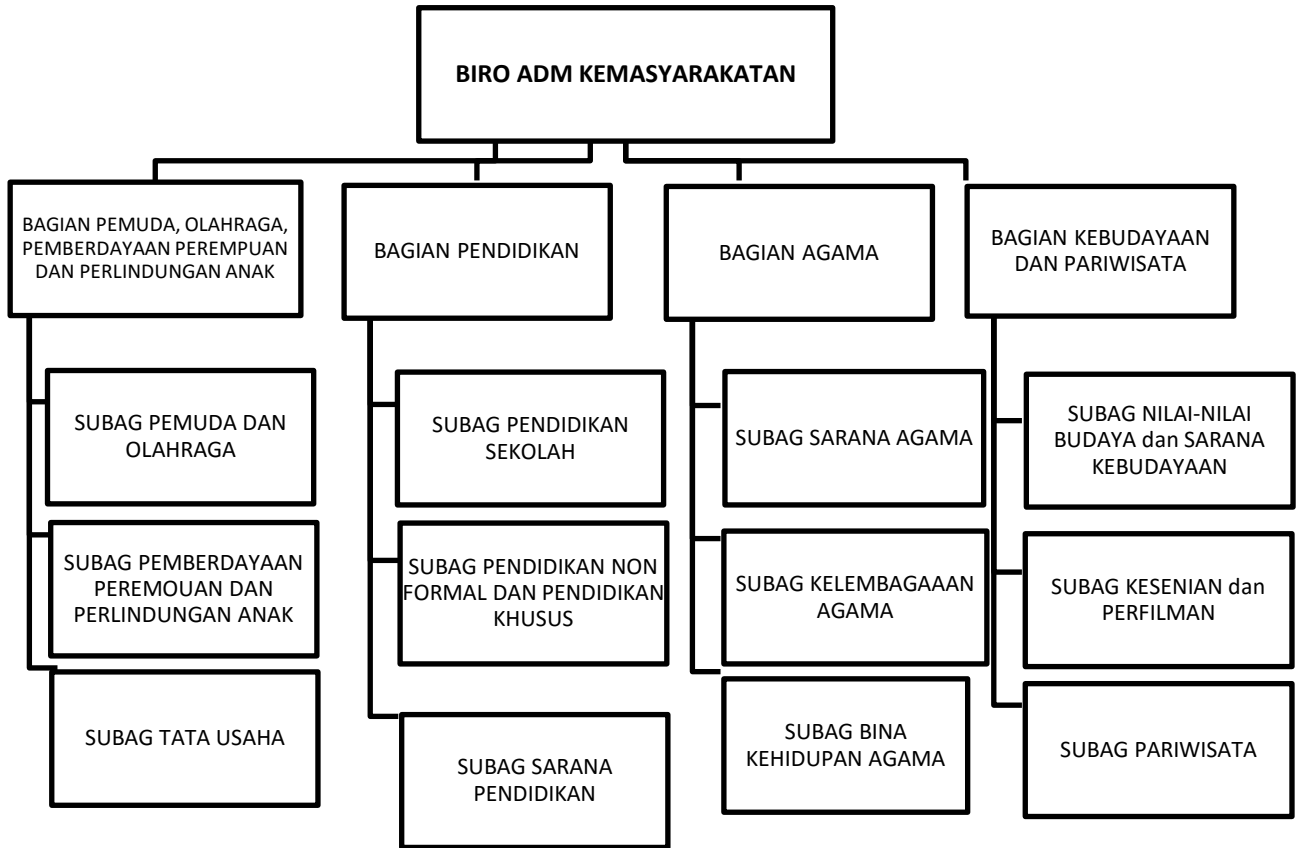
Sebagaimana diuraikan dalam Pasal-pasal di Peraturan Gubernur Jawa Timur bahwa Biro Administrasi Kemasyarakatan terdiri dari 4 (empat) Bagian yang masing-masing Bagian membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dengan jumlah personil sebanyak **111 orang** mempunyai tugas “menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan, administrasi dan sumber daya di Bidang Agama, Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata, Pemuda, Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Biro Administrasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang administrasi kemasyarakatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang agama, pendidikan, kebudayaan dan pariwisata, pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang agama, pendidikan, kebudayaan dan pariwisata, pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang administrasi kemasyarakatan;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten.

Disamping melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Biro Administrasi Kemasyarakatan juga melaksanakan tugas dan fungsi adhoc sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/931/KPTS/013/2014 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015.

I.5. Susunan Organisasi Biro Administrasi Kemasyarakatan



I.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur pada Triwulan I Tahun Anggaran 2015 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan Tujuan
- I.4 Gambaran Umum
- I.5 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- II.1 Rencana Strategik (RS)
- II.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- II.3 Perjanjian Kinerja (PK)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- III.1 Capaian Kinerja Organisasi
- III.2 Realisasi Anggaran
- III.3 Evaluasi dan Analisa Kinerja

BAB IV PENUTUP

- IV.1 Kesimpulan
- IV.2 Saran/upaya yang akan dilaksanakan untuk Peningkatan Kinerja

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

II.1. RENCANA STRATEGIK

Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja, suatu organisasi mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Didalam suatu Perencanaan Strategis terdapat visi dan misi organisasi yang akan dicapai dalam suatu periode. Adapaun visi dan misi Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi

“Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kemasyarakatan Yang Berkualitas Demi Terciptanya Kesalehan Sosial dan Harmoni Sosial”

2. Misi

“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kemasyarakatan”.

3. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kemasyarakatan

b. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kemasyarakatan di Bidang Agama, Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Kebudayaan dan Pariwisata

Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Biro Administrasi Kemasyarakatan bisa ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel - 1
Hubungan Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kemasyarakatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kemasyarakatan di Bidang Agama, Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Kebudayaan dan Pariwisata	Persentase dukungan Kebijakan di Bidang Agama, Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Kebudayaan dan Pariwisata

Tabel - 2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kemasyarakatan yang berkualitas demi terciptanya Kesalehan Sosial dan Harmoni Sosial			
MISI : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kemasyarakatan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kemasyarakatan	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kemasyarakatan di Bidang Agama, Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kebudayaan dan Pariwisata	Persentase dukungan layanan Administrasi Kemasyarakatan di Bidang Agama, Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kebudayaan dan Pariwisata	Peningkatan Fasilitas Kebijakan Pembangunan di Bidang Administrasi Kemasyarakatan

4. Program Biro Administrasi Kemasyarakatan

Program pada dasarnya merupakan kumpulan kegiatan yang dihimpun dalam satu kelompok yang sama secara sendiri maupun bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program merupakan alat bagi pencapaian tujuan dan sasaran. Penetapan program dilakukan dengan melihat kebijakan, tujuan, sasaran, visi dan misi yang telah ditetapkan serta mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, dan meningkatkan pelayanan publik dengan kebijakan yang diarahkan untuk:

- (a) Mempercepat perwujudan perubahan pola berpikir dan orientasi birokrasi dari dilayani menjadi melayani masyarakat;
- (b) Mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan profesional untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- (c) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan;
- (d) Meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima;
- (e) Mendorong partisipasi masyarakat untuk turut merumuskan program dan kebijakan layanan publik.

Program Prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi ke dalam 24 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Biro administrasi Kemasyarakatan akan melaksanakan urusan wajib tentang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, dan Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- (a) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- (b) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- (c) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
- (d) Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
- (e) Dukungan Layanan Administrasi Kemasyarakatan.

Tabel - 3
Program Biro Administrasi Kemasyarakatan

PROGRAM	INDIKATOR
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan administrasi Perkantoran dan kenyamanan kantor
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yg layak fungsi
3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase Kelembagaan yang tepat fungsi
4. Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
5. Dukungan Layanan Administrasi Kemasyarakatan	Persentase dukungan layanan di Bidang Kemasyarakatan (Bidang Agama, Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pemberdayaan Perempuan Anak serta Kebudayaan dan Pariwisata)

II.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berisikan perencanaan global dengan penjabaran hanya sampai kepada program hingga perlu dioperasionalkan dengan perencanaan yang lebih mikro sampai penjabaran terakhir pada kegiatan-kegiatan, namun masih dalam satu rangkuman dari seluruh perencanaan pembangunan.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2015 Biro Administrasi Kemasyarakatan, Sekeratariat Daerah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Pada Tahun Anggaran 2015 Biro Administrasi Kemasyarakatan mendapat alokasi anggaran sebagai berikut :

I. **Belanja Langsung** melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebesar **Rp 27.215.538.190,00** dengan rincian :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

- Pelaksanaan administrasi perkantoran : Rp 924.156.000,00

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

a. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana : Rp 846.536.190,00

b. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana : Rp 804.250.000,00

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah

Daerah

Kegiatan :

a. Koordinasi dan konsultasi Kelembagaan Pemda : Rp 40.000.000,00

b. Peningkatan Kapasitas SDM : Rp 138.294.000,00

4. Program Penyusunan , Pengendalian & Evaluasi Dokumen

Penyelenggaraan Pemerintahan

Kegiatan :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan : Rp. 40.000.000,00

b. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan rencana Program dan Anggaran : Rp 100.000.000,00

c. Penyusunan Pengembangan pemeliharaan & pelaksanaan : Rp 34.600.000,00
Sistim Informasi Data

5. Program Dukungan Layanan Admnistrasi Kemasyarakatan

Kegiatan :

a. Fasilitasi Peningkatan Kualitas Guru Madin : Rp. 652.783.000,00

b. Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Keagamaan : Rp 5.198.257.000,00

c. Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan : Rp 4.900.000.000,00

d. Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemuda dan Olahraga : Rp 3.473.788.700,00

- e. Fasilitas Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Rp 1.341.911.350,00
- f. Fasilitas Kegiatan Verifikasi Monitoring dan Evaluasi (monev) lembaga social kemasyarakatan : Rp 5.500.000.000,00
- g. Fasilitas Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kebudayaan : Rp 2.221.548.850,00
- h. Fasilitas Pelaksanaan di Bidang Pariwisata : Rp 998.351.200,00

II. **Belanja Tidak Langsung** (Hibah) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-SKPKD/KPPKD) sebesar **Rp 441.237.500.000,00** dengan rincian :

- 1. Belanja Hibah kepada Kepada Badan/Lembaga/Organisasi : Rp 365.945.000.000,00
- 2. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat sebesar : Rp 75.292.500.000,00

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, maka pelaksanaan program kegiatan sebagaimana tersebut diatas telah dituangkan dalam rencana kinerja tahunan tahun 2015 bisa ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel - 4
RENCANA KINERJA TAHUN 2015
BIRO ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	Persentase dukungan Kebijakan di Bidang Agama, Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Kebudayaan dan Pariwisata	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi Perkantoran dan kenyamanan kantor	100 %
		2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yg layak fungsi	100 %
		3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase Kelembagaan yang tepat fungsi	100 %

		4. Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	12
		5. Dukungan Layanan Administrasi Kemasyarakatan	Persentase dukungan layanan di Bidang Kemasyarakatan (Bidang Agama, Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pemberdayaan Perempuan Anak serta Kebudayaan dan Pariwisata)	100 %

II.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Rencana Kinerja Tahunan Biro Administrasi Kemasyarakatan Tahun 2015 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di tahun 2015 menjadi tumpuan bagi Biro Administrasi Kemasyarakatan untuk mewujudkan kinerja Output ataupun Outcome yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2015 berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi seperti yang tertera pada *lampiran*.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Administrasi Kemasyarakatan tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK) Biro Administrasi Kemasyarakatan, juga tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat. Dengan berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama, maka Biro Administrasi Kemasyarakatan menetapkan tujuan dan sasaran.

III.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Biro administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dari segi pengukuran kinerja kegiatan yang dituangkan dalam laporan Kinerja dibawah ini merupakan hasil kinerja Biro administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam Tahun Anggaran 2015 yang mana capaian kinerja masing-masing proses penyusunan capaian kinerja melalui pembobotan bertingkat pada setiap tahapan proses evaluasi dengan menggunakan 4 formulir pengukuran kinerja. 4 formulir tersebut adalah :

1. Rencana Strategis (RS)
2. Rencana Kerja Tahunan (RKT)
3. Perjanjian Kinerja (PK)
4. Pengukuran Kinerja (PK)

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukannya penghitungan akan dilakukan selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (performant improvement). Guna menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan skala ordinal sebagai berikut :

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Nilai 85 s.d 100	BAIK
2.	Nilai 70 < 85	SEDANG
3.	Nilai 55 < 70	KURANG
4.	Nilai < 55	SANGAT KURANG

Tabel - 5
CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2015

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	TARGET	REALISASI
1	Persentase dukungan Kebijakan di Bidang Agama, Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Kebudayaan dan Pariwisata	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	78,35 %
		2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	82,40 %
		3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	100 %	2,97 %
		4. Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	4 dokumen	4 dokumen
		5. Program dukungan Layanan Administrasi Masyarakat	100 %	44,24 %
2.	Belanja Tidak Langsung	Belanja Hibah	<u>100 %</u>	<u>74,63 %</u>
		1. Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi	100 %	71,05 %
		2. Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat	100 %	91,85 %

III.2. REALISASI ANGGARAN :

Pada Tahun Anggaran 2015 Biro Administrasi Kemasyarakatan mendapat alokasi anggaran sebagai berikut :

1. **Belanja Langsung** melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebesar **Rp 27.215.538.190,00** dengan pembagian alokasi sebagai berikut :
 - a. Triwulan I sebesar : Rp 5.522.802.400,00 (20,29 %)
 - b. Triwulan II sebesar : Rp 8.486.857.600,00 (31,18 %)
 - c. Triwulan III sebesar : Rp 6.573.140.900,00 (24,15 %)
 - d. Triwulan IV sebesar : Rp 6.632.735.290,00 (24,38 %)

2. **Belanja Tidak Langsung** (Hibah) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-SKPKD/ KPPKD) sebesar **Rp 441.237.500.000,00**
 - a. Triwulan I sebesar : Rp 88.098.500.000,00 (19,97 %)
 - b. Triwulan II sebesar : Rp 153.677.375.000,00 (34,83 %)
 - c. Triwulan III sebesar : Rp 111.363.125.000,00 (25,23 %)
 - d. Triwulan IV sebesar : Rp 88.098.500.000,00 (19,97 %)

Adapun realisasi anggaran tahun 2015 pada Triwulan I bisa ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel - 6
REALISASI ANGGARAN PADA TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2015

NO	JENIS BELANJA	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1	Belanja Langsung	1. Program Pelayanan	Rp 5.522.802.400,00	Rp 2.466.878.932,00	44,67
		Administrasi	<u>Rp 184.830.000,00</u>	<u>Rp 144.811.115,00</u>	<u>78,35</u>
		Perkantoran			
		<u>Kegiatan :</u>			
		-Pelaksanaan	Rp 184.830.000,00	Rp 144.811.115,00	78,35
		administrasi			
		Perkantoran			

NO	JENIS BELANJA	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
		2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur <u>Kegiatan :</u> a. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana b. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana	Rp 120.907.000,00 Rp 113.707.000,00 Rp 7.200.000,00	Rp 99.634.814,00 Rp 99.634.814,00 Rp 0,00	82,40 87,62 0
		3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah <u>Kegiatan :</u> a. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah b. Peningkatan Kapasitas SDM	Rp 146.294.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 138.294.000,00	Rp 4.349.000,00 Rp 2.349.000,00 Rp 2.000.000,00	2,97 29,36 1,45
		4. Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan <u>Kegiatan :</u> a. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran b. Penyusunan Pengembangan Pemeliharaan & Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Rp 26.920.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 6.920.000,00	Rp 12.586.710,00 Rp 11.156.710,00 Rp 1.430.000,00	46,76 55,78 20,66

NO	JENIS BELANJA	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
		5. Program dukungan Layanan Administrasi Masyarakat <u>Kegiatan :</u>	<u>Rp4.985.851.400,00</u>	<u>Rp2.205.497.293,00</u>	<u>44,24</u>
		a. Fasilitas Peningkatan Kualitas Guru Madin	Rp 0,00	Rp 0,00	0
		b. Fasilitas Pelaks. Kebijakan Bidang Keagamaan	Rp1.410.448.900,00	Rp 425.085.960,00	30,14
		c. Fasilitas Pelaks. Kebijakan Bidang Pendidikan	Rp 678.545.000,00	Rp 124.639.700,00	18,37
		d. Fasilitas Pelaks. Kebijakan Bidang Pemuda dan olahraga	Rp 645.150.500,00	Rp 375.891.750,00	58,26
		e. Fasilitas Pelaks. Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp 113.538.000,00	Rp 7.548.900,00	6,65
		f. Fasilitas Pelaks. Kebijakan Bidang Kebudayaan	Rp 338.489.000,00	Rp 31.845.888,00	9,41
		g. Fasilitas Pelaks. Kebijakan Bidang Pariwisata	Rp 303.520.000,00	Rp 74.391.450,00	24,50
		h. Fasilitas kegiatan Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Lembaga Sosial Masyarakat	Rp1.496.160.000,00	Rp1.166.093.645,00	77,94

NO	JENIS BELANJA	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
2.	B. Tidak Langsung	Belanja Hibah	Rp88.098.500.000,00	Rp65.745.932.050,00	74,63
		a. Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi	Rp72.939.000.000,00	Rp51.820.932.050,00	71,05
		b. Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat	Rp15.159.500.000,00	Rp13.925.000.000,00	91,85

III.3 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan formulir Pengukuran Kinerja (PK), dilakukan evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Namun pengukuran itu saja tidak cukup tanpa tahu apa deskripsi dari semua kondisi itu, kondisi-kondisi tersebut perlu dianalisis dari pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan agar dapat diketahui hubungan permasalahannya untuk diidentifikasi sebagai sebab akibat berupa faktor-faktor yang mempengaruhinya, mana yang menjadi hambatan dan kendala untuk dijadikan *feed back* bagi perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada putaran atau periode waktu Triwulan berikutnya.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Biro Administrasi Kemasyarakatan pada Triwulan I Tahun Anggaran 2015 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel-7
EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi Perkantoran dan kenyamanan kantor	100 %	78,35 %

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yg layak fungsi	100 %	82,40 %
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase Kelembagaan yang tepat fungsi	100 %	2,97 %
4. Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	4 dokumen (100 %)	4 dokumen (100 %)
5. Dukungan Layanan Administrasi Kemasyarakatan	Persentase dukungan layanan di Bidang Kemasyarakatan (Bidang Agama, Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pemberdayaan Perempuan Anak serta Kebudayaan dan Pariwisata)	100 %	44,24 %
6. Pelaksanaan bantuan hibah	Terealisasinya bantuan hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi dan Kelompok Masyarakat	100 %	74,63 %

Berdasarkan Hasil pengukuran **indikator Program tersebut** dapat disimpulkan bahwa capaian pengukuran kinerja termasuk kategori **kurang**, yaitu sebesar **63,77 %**, hal ini dikarenakan beberapa faktor :

1. Belum adanya kejelasan tentang penggunaan fasilitas akomodasi (Hotel) ;
2. Penyesuaian tentang laporan pertanggungjawaban keuangan untuk perjalanan dinas (ad-cost)

BAB IV

PENUTUP

IV.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Pemerintah, dan juga merupakan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya good governance. Dalam perspektif, Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi dari SKPD dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan kata lain Laporan Kinerja pada dasarnya merupakan laporan kepada pihak publik/eksternal walaupun manfaatnya lebih banyak kepada pihak internal. Oleh karena itu penyajian informasi dalam laporan Kinerja Instansi Pemerintah harus dipertimbangkan untuk dapat dipergunakan oleh pihak luar.

Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi kinerja pada Triwulan I Tahun Anggaran 2015, maka beberapa permasalahan yang terjadi antara lain :

Hambatan Eksternal :

- a. Belum adanya kejelasan tentang penggunaan fasilitas akomodasi (Hotel) untuk kegiatan workshop/sosialisasi;
- b. Keterlambatan revisi Pedoman Umum tentang Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah (terutama untuk perjalanan dinas);
- c. Masih relatif rendahnya pemahaman lembaga penerima bantuan hibah dalam mengimplementasikan SOP;

Sedangkan **Hambatan/Kendala Internal :**

- a. Masih lembahnya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten;
- b. Belum tersosialisasinya SOP bantuan hibah secara menyeluruh kepada calon penerima hibah;

IV.2. SARAN

Beberapa langkah kedepan yang akan dilaksanakan oleh Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam mengatasi hambatan dan kendala tersebut di atasantara lain adalah :

- a) Penyempurnaan mekanisme dan meningkatkan pelayanan administrasi baik tingkat kualitas maupun kuantitas ;
- b) Peningkatan upaya koordinasi dengan berbagai Instansi terkait baik pusat maupun daerah akan dilakukan lebih intensif;
- c) Sangat diperlukan saran dari stakeholder terkait dalam rangka peningkatan kinerja Biro Administrasi Kemasyarakatan ;
- d) Mengoptimalkan SDM yang ada melalui pelatihan dan Bimbingan Tehnis.

Demikian Laporan Kinerja Biro Administrasi Kemasyarakatan pada Triwulan Pertama Tahun Anggaran 2015 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Surabaya, April 2015

KEPALA BIRO ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN

Drs. BAWON ADHI Y, M.SI

Pembina Utama Muda

NIP. 19541218 198503 1 006

DATAR ISI

KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
BAB I PENDAHULUAN	4
I.1. Latar Belakang	4
I.2. Landasan Hukum	5
I.3. Maksud dan Tujuan	6
I.4. Gambaran Umum	6
I.5. Susunan Organisasi	8
I.6. Sistematika Penulisan	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	10
II.1. Rencana Strategik	10
II.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2015	13
II.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2015	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
III.1. Capaian Kinerja Organisasi	19
III.2. Realisasi Anggaran	20
III.3. Evaluasi dan Analisa Kinerja	24
BAB IV PENUTUP	28
IV.1. Kesimpulan	28
IV.2. Saran	30

LAMPIRAN-LAMPIRAN

5. Matrik RENSTRA 2014-2019
6. Indikator Kinerja Utama (IKU)
7. Perjanjian Kinerja 2015
8. Rencana Kerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (RENJA) 2015

